

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Komang Sartika Dewi¹, Wayan Cipta², I Wayan Bagia³

Jurusan Manajemen
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: komangsartika@yahoo.co.id, Cipta1959@yahoo.co.id, Bagiaundiksha@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh (1) sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan, (2) sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah, (3) sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan, dan (4) pengawasan Keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Buleleng dan Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 'Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa data hasil kuesioner terkait sistem pengendalian *intern*, pengawasan keuangan daerah, dan nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng, dan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari (1) Sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan Daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan, (2) Sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah, (3) Sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan, dan (4) Pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci : Nilai informasi laporan keuangan, pengawasan keuangan, dan sistem pengendalian *intern* pemerintah

Abstract

This research aimed to obtain an explanatory findings were tested on the effect of 1) the system of intern control and the control of regional finance to information value of financial statements, (2) the system of intern control to the control of regional finance, (3) the system of intern control to information value of financial statements, and (4) the control of regional finance and information value of financial statements at SKPD Buleleng regency. The research design used in this study is causal quantitative. Population in this research SKPD in Buleleng regency and sample in this research using purposive sampling method. Types of data collected are primary data and secondary data. primary data in this research is data in the form of data from a questionnaire related the system of intern control, the control of regional finance and information value of financial statements at SKPD Buleleng regency, and secondary data in this research is supporting documents. The data collected was analyzed by path analysis. The results showed there was a positive and significant effect of (1) the system of intern control and the control of regional finance to information value of financial statements, (2) the system of intern control to the control of regional finance, (3) system of intern control to information value of financial statements, and (4) the control of regional finance and information value of financial statements at SKPD Buleleng regency.

Key words: information value of financial statements, the control of regional finance and the system of intern control

Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, setiap daerah dibentuk perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, dimana perangkat daerah ini disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Ada dua hal yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan, hal pertama yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian *intern* merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian *Intern* (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian *Intern* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan

mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. Hal kedua yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada hasil pemeriksaan auditor menurut data BPK RI Provinsi Bali pada tahun 2013 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng dinyatakan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan yang kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Hal ini terbukti dengan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut diungkapkan temuan pemeriksaan yang mengindikasikan kerugian daerah.

Nilai informasi yang baik harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Sedangkan pada SKPD Kabupaten Buleleng fakta menunjukkan bahwa nilai informasi laporan keuangannya masih lemah karena ada dua karakteristik nilai informasi yang menyebabkan laporan keuangan SKPD Kabupaten Buleleng tersebut lemah yaitu belum relevan dan andal. Suatu laporan keuangan dikatakan relevan yaitu memiliki unsur manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu serta lengkap. Pada SKPD Kabupaten Buleleng fakta menunjukkan dari beberapa SKPD masih adanya keterlambatan/ tidak tepat waktu dalam penyeteroran ke kas daerah. Hal ini dibuktikan pendapatan retribusi daerah dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlambat disetor sebesar Rp. 30.625 juta. Selanjutnya karakteristik nilai informasi yang menyebabkan nilai informasi laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng masih lemah yaitu keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan andal jika laporan keuangan bebas dari penyimpangan dan kesalahan yang material. Sedangkan pada SKPD kabupaten buleleng fakta menunjukkan masih banyak penyimpangan pada laporan keuangan pada SKPD tertentu seperti: kerugian daerah sebesar Rp. 88,28 juta yang terdiri dari pembayaran premi asuransi kesehatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 27,06 juta dan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp. 61,22 juta, serta kerugian daerah atas pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 98.768 juta. Selain itu yang menyebabkan nilai informasi laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng lemah yaitu

Sistem Pengendalian *Intern* Pemenrintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah yang baik meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait pencatatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, dan (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Sedangkan pada SKPD Kabupaten Buleleng, fakta menunjukkan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) masih lemah. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu menyangkut pengelolaan dan penatausahaan aset milik Pemkab Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan melihat instansi teknis yang membidangi masalah aset dan barang milik daerah ini belum tertib melakukan pendataan dan pengelolaan aset yaitu aset tetap peralatan dan mesin tidak tercatat 64.542 unit senilai Rp. 31,54 miliar, serta aset tetap gedung dan bangunan tidak tercatat 740 unit senilai Rp. 62,85 miliar. Selain sistem pengendalian *intern* yang lemah, pengawasan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng juga masih lemah. Hal ini terbukti adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp. 78.790 juta atas 43 nama pelaksana perjalanan dinas luar daerah tidak ditemukan pada data *manifest* maskapai, Kelebihan pembayaran biaya akomodasi dan selisih harga tiket pesawat sebesar Rp. 16.091 juta atas lima nama pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang tanggal kepulangannya mendahului tanggal surat tugas, serta terdapat somasi dari pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pengadaan barang dan jasa periode tahun

2008 s.d. 2013 sebesar Rp. 2.968.318.430,55.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, serta pengawasan laporan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Ini didukung juga oleh teori dari Tuasikal (2007) yang menyatakan jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik. Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah.

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi keuangan daerah dilakukan oleh Yuliarta (2013) dan Armando (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013?, (2) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) terhadap pengawasan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng

Tahun 2013? (3) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013?, dan (4) Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Seberapa Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013, (2) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) terhadap pengawasan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013, (3) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dan (4) Seberapa besar pengaruh pengawasan Keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait, khususnya tentang sistem pengendalian *intern* pemerintah, pengawasan laporan keuangan dan nilai informasi laporan keuangan dan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi menyusun laporan keuangan dan nilai informasi laporan keuangan daerah bahwa laporan keuangan sangat penting untuk digunakan sebagai

alat untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian *Intern* yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. COSO dalam Moeller (2009: 33) mengidentifikasi sistem pengendalian *intern* yang efektif meliputi lima komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (risk assessment), (3) Aktivitas Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (information and communication), dan (5) Pemantauan.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akandicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan

dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Nilai informasi laporan keuangan pemerintah merupakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Hal ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai

nilai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bahwa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian *intern* pemerintah, pengawasan keuangan daerah dan nilai informasi laporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan 15 SKPD. 15 SKPD tersebut terdiri dari 60 responden yang meliputi seluruh kepala Dina, kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Sub Perencanaan. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner, kemudian dianalisis dengan analisis jalur.

Hasil Dan Pembahasan

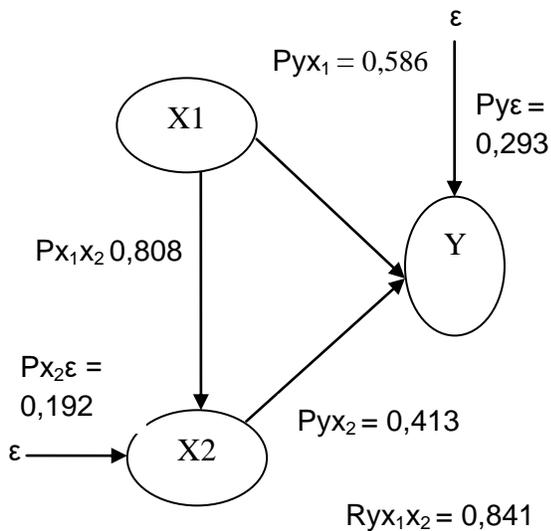
Hasil analisis jalur dengan bantuan program aplikasi komputer *Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0 for Windows*, maka diperoleh hasil penelitian seperti yang tampak pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Analisis Jalur

No	Parameter	Koefisien	p-value	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
1	$R_{yx_1x_2}$	0,841	0,000	0,05	Menolak H_0	Ada hubungan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y
2	$R^2_{yx_1x_2}$	0,707	0,000	0,05	Menolak H_0	Besar sumbangan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y adalah 70,70%
3	$P_{x_1x_2}$	0,808	0,000	0,05	Menolak H_0	Ada hubungan pengaruh X_1 terhadap X_2
4	P_{yx_1}	0,586	0,000	0,05	Menolak H_0	Ada hubungan pengaruh X_1 terhadap Y
5	$P^2_{yx_1}$	0,340	0,000	0,05	Menolak H_0	Besar sumbangan pengaruh X_1

6	P_{YX_2}	0,413	0,001	0,05	Ho Menolak	terhadap Y adalah 34% Ada hubungan pengaruh X_2 terhadap Y
7	$P^2_{YX_2}$	0,171	0,001	0,05	Ho Menolak	Besar sumbangan pengaruh X_2 terhadap Y adalah 17,10%
8	$P_{Y\epsilon}$	0,293	-	-	-	Ada hubungan pengaruh faktor lain terhadap Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS



Gambar 1 Struktur Pengaruh Variabel X_1 , dan X_2 terhadap Y

Keterangan: X_1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 X_2 = Pengawasan Keuangan Daerah
Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan
 ϵ = faktor lain

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah (SPIP) dan pengawasan keuangan daerah secara positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 70,70% nilai informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan pengaruh

dari variabel lain diluar variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan daerah sebesar 29,30%. Variabel lain yang diduga mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan daerah menurut Armando (2013) adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Hasil uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah (SPIP) terhadap pengawasan keuangan daerah Besar pengaruh dari sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah adalah 80,80% sedangkan pengaruh faktor lain terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 19,20%.

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Keeratan hubungan pengaruh dari sistem pengendalian *intern* terhadap nilai informasi laporan keuangan sebesar 58,60% dan besar sumbangan pengaruh adalah 34%.

Hasil pengujian statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh pengawasan keuangan daerah pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Keeratan hubungan pengaruh dari pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan sebesar 41,30% dan besar sumbangan pengaruh dari pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan adalah 17,10 %.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini mendukung kajian empirik dari Armando (2013) yang menyatakan sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Hasil Penelitian mengenai pengaruh dari variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Armando (2013) yang menyatakan sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh dari variabel sistem pengendalian *intern* pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng, hasil tersebut didukung oleh kajian empirik dari Indriasari (2008) yang menyatakan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh dari variabel pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini

sesuai dengan penelitian dari Yuliarta (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 70,70% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor faktor lain sebesar 29,30% yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasi laporan keuangan. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan anlisan dan tertulis.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah

- (1) Sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengawasan keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng
- (2) Sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng
- (3) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng

- (4) Sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu

- (1) Hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian *intern* pemerintah terutama pada pencatatan keuangan yang menyangkut pengelolaan dan penatausahaan asset milik Pemkab Buleleng karena ada instansi teknis yang membidangi masalah asset dan barang milik daerah belum tertib melakukan pendataan dan pengelolaan asset daerah. Pengawasan keuangan daerah juga telah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah

- (2) Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung dan metode survei lapangan.

Daftar Rujukan

Aris, Fatchurrochman. 2012. Skripsi Analisis Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung tahun 2001

Armando, Gerry. 2013. pengaruh sistempengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangandaerah terhadap nilai informasi laporankeuangan pemerintah Kota Bukittinggi. skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/80>.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bali. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan TA 2013 Buku III*.

Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. <https://smartaccounting.files.wordpress.com> Vol. 9 No. 1 Hal. 65-72

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001, Pasal 16 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge*. Seventh Edition. England: John Wiley & Sons.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangandan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Undang-Undang Keuangan Negara pasal 1 ayat (8)
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan Birokrasi*, diakses pada 11/06/2013 08:01
<<http://itjendepdagri.go.id/article-24-birokrasi.html>>
- Yuliarta. 2013. Pengaruh Kompensasi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Padang. Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/68/56>.